



Kondisi tumpukan sampah di salah satu tempat pembuangan sementara di Kota Yogya, saat TPA Piyungan ditutup total, beberapa waktu lalu.



Pemkot Yogya Targetkan Nol Pembuangan Sampah Anorganik di 2023 Sampah Anorganik Ditargetkan Nol di Tahun 2023

YOGYA, TRIBUN - Polemik persampahan seakan jadi masalah berkepanjangan dan tidak berujung bagi Kota Yogyakarta. Berulang kali, ketika Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, Kabupaten Bantul, mengalami kendala operasional, kondisi 'darurat sampah' pun nyaris selalu terjadi di penjuru Kota Pelajar.

Kondisi itu semakin diperparah dengan ancaman TPA Piyungan yang tidak sanggup lagi menampung duangan sampah pada akhir 2023 mendatang. Upaya Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk merevitalisasi TPA Piyungan dengan pola kerja sama dengan swasta, paling cepat baru bisa terealisasi pada 2026.

Ahasil, seandainya Pemkot Yogyakarta bersama dua daerah lain, yakni Bantul dan Sleman yang masih terus mengandalkan

TPA Piyungan tidak melakukan langkah khusus, maka potensi bahaya rawan muncul. Terutama dalam rentang 2024-2026, lantaran sampah tidak bisa teralokasi maksimal, menuju TPA Piyungan.

"Makanya, butuh langkah khusus. Sampah anorganik harus berhenti di sumber sampah. Tidak boleh sampah anorganik dikirim ke TPA. Ini kebijakan Pemkot, sedang dirumuskan. Mudah-mudahan di akhir bulan Desember nanti sudah dapat terealisasi," tandas Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sumadi, Senin (11/11).

Tidak bisa dipungkiri, selama ini sampah anorganik memang menjadi sumber 'peta-ka' bagi TPA Piyungan, karena sifatnya yang sukar terurai. Sementara, alokasi 260 ton sampah yang dibuang dari Kota Yogyakarta menuju pembuangan akhir di Bantul itu, 43

persennya adalah anorganik beragam jenis.

"Target kami, 40 persen anorganik bisa ditekan dan tidak dibuang lagi ke Piyungan. Jadi, 40 persen muat harus berhenti di sumbernya," ungkapnya.

Jikalau target tersebut mampu terealisasi pada 2023 mendatang, Kota Yogyakarta hanya akan mengirim 150 ton sampah per hari menuju TPA Piyungan. Sehingga, usia, atau masa pakai TPA Piyungan pun kemungkinan bisa diperpanjang lagi, sembari menanti revitalisasi oleh Pemda DIY terselesaikan pada 2026.

"Ya, tidak berhenti di akhir 2023 saja, bisa mundur lagi seandainya pembuangan sampah anorganik ditekan secara masif. Karena revitalisasi paling cepat 2026, jadi bisa saja lebih dari itu," jelas Sumadi.

Namun, tanpa dibarengi langkah khusus

yang sifatnya intens dari hulu, urusan persampahan bakal menjadi persoalan pelek. Karena itu, masyarakat tidak boleh lagi abai terhadap sampah, mengingat pengelolaan sampah bukan sebatas menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh komponen warga.

Apalagi, sebagai daerah tujuan wisata dan pendidikan, ditambah lagi status ibu kota provinsi, tingkat aktivitas dan mobilitas di Kota Yogyakarta, cenderung sangat tinggi. Sehingga, peningkatan volume sampah dari tahun ke tahun pun dipastikan semakin meningkat, dimana potensi permasalahan otomatis ikut melonjak pula.

"Jika masalah itu tidak tertangani dengan baik, maka tidak hanya masalah lingkungan yang muncul, tapi juga ekonomi dan sosial," tandasnya. (aka)

Skema yang Bakal Diterapkan

PEMKOT Yogyakarta mematok target 2023 mendatang, sebagai momentum pengelolaan sampah secara masif dan besar-besaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Aman Yuniadjaya menyampaikan, pihaknya menancangkan revolusi sampah pada penghujung 2022 ini. Langkah nyata yang diterapkan ialah, menekan pembuangan sampah anorganik menuju TPA Piyungan, dengan melibatkan seluruh komponen dan elemen penduduk.

Dijelaskannya, 43 persen pembuangan sampah dari Kota Yogyakarta menuju TPA Piyungan per hari dengan total sekitar 260 ton, adalah sampah anorganik. Pada 2023 nanti, tandasnya, seluruh sampah anorganik itu tidak akan dialokasikan ke

tempat pembuangan akhir, namun dikelola mandiri, dengan beragam langkah.

"Jadi, kami mewajibkan semua komponen melakukan pemilahan. Hukumnya wajib, termasuk perkantoran. Sejak awal harus dipilah, tidak boleh tidak. Makanya, ini sedang kita siapkan Perwal-nya juga," tegasnya.

Skema awalnya, tentu dimulai dari sampah-sampah yang bersumber dari lingkup rumah tangga. Warga harus bisa memilah sampah anorganiknya sendiri, untuk diserahkan, atau dijual kepada pelapak. Menurutnya, pada 2023 mendatang, peran pelapak sebagai ujung tombak bakal dipasrahi tanggungjawab lebih besar.

"Sudah kita koordinasikan dengan pelapak-pelapak di Kota Yogyakarta, karena nanti akan ditetapkan zonasi kerjanya. Sebab, volume pengambilan mereka praktis bakal semakin meningkat itu nanti," tandas Aman.

Selanjutnya, filter kedua setelah pelapak adalah para transporter atau penggerobak

yang sehari-hari punya tugas mengangkut sampah di lingkungan masyarakat. Ia menegaskan, kedepannya mereka akan disatukan dan dikoordinasikan di tingkat Kota Yogyakarta, serta mendapat tugas khusus mensortir sampah anorganik.

"Supaya mereka punya hak dan kewajiban. Misal ada sampah anorganik yang terbawa, ya harus mereka pilah dahulu. Karena, kalau tidak dipilah sampahnya tidak boleh dibuang ke TPS atau depo," ungkapnya.

Kemudian, tempat pembuangan sementara bakal dijadikan sebagai filter terakhir untuk mengantisipasi adanya residu sampah anorganik yang tersisa. Sebab, ia menyadari, masih banyak limbah anorganik rumah tangga yang tak laku oleh pelapak, karena dianggap memiliki nilai keekonomian rendah di pasaran.

"Nah, residunya diumpulkan oleh depo, dan dikelola unit TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang ada di Nitikan. Saat ini TPST masih mengelola sampah organik. Tetapi, besok bakal kami ubah jadi

anorganik. Infrastruktur juga sudah kami siapkan, termasuk lokasi baru untuk realisasi TPST Nitikan 2," ujarnya.

Tidak berhenti sampai di situ, saat 43 persen sampah anorganik sanggup tersesakan lewat skema tersebut, masih terdapat sekitar 150 ton sampah anorganik yang tersisa. Ia berujar, Pemkot tidak akan membiarkannya dibuang begitu saja menuju TPA Piyungan, sehingga mekanisme pengelolaan pun juga bakal ditempuh.

Ditegaskannya, Pemkot Yogyakarta kini telah memiliki rancangan bangun untuk pengelolaan sampah di luar Kota Pelajar, dimana dari proses perencanaan hingga penganggaran telah disiapkan secara rinci. Tetapi, ia menyebut, pengelolaan sampah organik itu baru bisa terealisasi setidaknya pada akhir 2024 mendatang.

"Jadi, kita sudah siapkan lokasi pengelolaan khusus untuk sampah anorganik ini di luar Kota Yogyakarta ya, tapi tentu tidak di Piyungan juga," pungkasnya. **(aka)**



Pj Wali Kota Yogya, Sumadi, saat menjajal produk meja dan kursi hasil daur ulang sampah di Klinik Bank Sampah Kota Yogya, beberapa waktu lalu.

Warga Diminta Adaptasi

UPAYA pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta secara masif dan besar-besaran per 2023 mendatang diprediksi bakal menimbulkan efek kejut bagi warga masyarakat. Khususnya, bagi mereka yang selama ini belum begitu aware terhadap pemilahan sampah yang bersumber dari rumah tangganya.

Aman Yuniadjaya, menandaskan, mulai 2023 pihaknya telah mematok target nol pembuangan sampah anorganik ke TPA Piyungan. Langkah tersebut ditempuh, dengan mewajibkan peran serta warga masyarakat secara aktif dalam prosesnya.

Menurutnya, warga yang tidak pernah mempedulikan pengolahan dan sembarang membuang sampah tanpa diaduhuluti pemilahan, dipastikan bakal kerepotan saat program tersebut diterapkan. Terlebih, nantinya bakal direalisasikan payung hukum mengikat, melalui Perwal yang ditargetkan terwujud di akhir 2022.

"Tentu, semua ini butuh rekonstruksi sosial. Sama seperti dulu ya, ketika orang terbiasa memasak pakai kompor (minyak), kemudian harus diganti dengan gas. Itu kan tidak mudah juga," tandasnya.

Akan tetapi, Sekda pun mendorong supaya penduduk bisa beradaptasi dengan proses pengelolaan sampah yang lebih rigid dan sistematis tersebut. Sebab, jika tak dibiasakan dari sekarang, pada akhir 2023 nanti, Kota Yogya bakal dilanda problem serius, mengingat TPA Piyungan tidak

mampu lagi menerima sampah.

"Memang butuh adaptasi. Lebih baik kita sulit dulu di depan, daripada nanti keget di belakang, dan tidak bisa melakukan apa-apa," tandasnya.

Aman menyatakan, persoalan sampah tidak bisa serta merta diselesaikan oleh pemerintah, tanpa peran aktif dari warga masyarakat. Bahkan, pihaknya kini mulai mengkoordinasikan upaya pengelolaan kepada para pengelola rumah sakit, pasar tradisional dan pusat perbelanjaan, hingga hotel-hotel dan restoran.

"Jadi, sekarang, khususnya untuk sampah anorganik, bukan tanggung jawab DLH (Dinas Lingkungan Hidup) saja. Tapi, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, sampai Dinas Perdagangan, dilibatkan juga. Semuanya wajib melakukan pemilahan," jelasnya.

Meski demikian, Sekda menyadari, upaya pengolahan yang dicanangkan lewat program revolusi sampah tak mungkin langsung berjalan optimal, pada awal 2023 nanti. Oleh sebab itu, sepanjang sisa waktu di akhir 2022 ini, pihaknya harus perlahan-lahan memberikan edukasi, serta menggugah kesadaran warga.

"Ya, 2023 kita mulai, meski tidak akan langsung total. Makanya, dua bulan ini kita harus jungkir balik siapkan proses, aturan dan mengkonsolidasikan jaringannya. Ini butuh adaptasi dan pasti timbul kegaduhan. Tapi, tetap harus dilakukan," pungkash Aman. **(aka)**



Sekda Kota Yogya, Aman Yuniadjaya, saat meninjau TPST Nitikan, beberapa waktu lalu.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005